PARTISIPASI MASYARAKAT DESA BILUNGALA KECAMATAN BONEPANTAI DALAM PEMILIHAN UMUM

ARTIKEL JURNAL

GUNAWAN LATALAMBE
NIM. D02420081

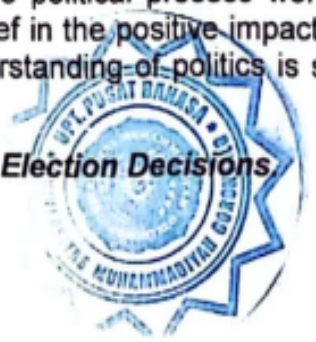
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
TAHUN AKADEMIK 2024

ABSTRACT

GUNAWAN LATALAMBE. Communities' Participation of Bilungala Village, Bonepantai District in the General Election. Supervised by APRIS ARA TILOME as Supervisor I and RUSLI ABDURAHMAN IDJI as supervisor II.

This research aims to dissect the comunities' participation of Bilungala Village, Bonepantai District in the General Election for the 2019 - 2024 period. This research method uses a descriptive qualitative method by collecting data through interviews, documentation and retrospectives. This research produced several findings from 3 (three) identified problems that have been dissected with Community Participation Theory using analysis of 3 (three) indicators, namely; a. Engagement Rate; The public routinely does not participate enough in elections, in this case the public has not demonstrated high political awareness and long-term commitment to the political process. Voting consistency is not yet an accurate representation of the diversity of people's votes in each election. b.; Influence on decisions, Political Infrastructure Support: Support from political institutions and infrastructure, including easy access to polling stations and transparent electoral institutions, has not helped towards public participation. This has the effect of making individuals in the community feel that their participation is less appreciated and less important. c. Sustainability of Participation, especially in sustainable political education, really helps increase people's understanding of importance of participation in democracy and how the political process works. This strengthens people's political awareness and belief in the positive impact of their vote. However, in reality the level of public understanding of politics is still low.

Keywords: Participation, Community, Involvement, Election Decisions.



ABSTRAK

GUNAWAN LATALAMBE. Partisipasi Masyarakat Desa Bilungala Kecamatan Bonepantai Dalam Pemilihan Umum. Di bimbing oleh APRIS ARA TILOME sebagai Pembimbing I dan RUSLI ABDURAHMAN IDJI sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk membedah Partisipasi Masyarakat Desa Bilungala Kecamatan Bonepantai Dalam Pemilihan Umum periode 2019 - 2024. Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskripsi dengan mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi dan retrospektif. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan dari 3 (tiga) identifikasi masalah yang telah di bedah dengan teori Partisipasi masyarakat dengan menggunakan analisis 3 (tiga) indikator yaitu; a. *Tingkat Keterlibatan*; yaitu : Masyarakat secara rutin kurang berpartisipasi dalam pemilu, dalam hal ini masyarakat belum menunjukkan kesadaran politik yang tinggi dan komitmen jangka panjang terhadap proses politik. Konsistensi memilih belum menjadi representasi yang akurat dari beragam suara masyarakat dalam setiap pemilihan. b.; *Pengaruh terhadap keputusan* yaitu; Dukungan Infrastruktur Politik: Dukungan dari lembaga dan infrastruktur politik, termasuk akses mudah ke tempat pemungutan suara dan lembaga pemilihan yang transparan, belum membantu terhadap partisipasi masyarakat. Hal ini berpengaruh terhadap individu masyarakat merasa bahwa partisipasinya kurang dihargai dan kurang penting. c. *Keberlanjutan Partisipasi*; Keberlanjutan Partisipasi terutama dalam pendidikan politik yang berkelanjutan sangat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam demokrasi dan bagaimana proses politik bekerja. Ini memperkuat kesadaran politik dan keyakinan masyarakat akan dampak positif dari suara mereka. Namun dalam kenyataan tingkat pemahaman masyarakat terhadap politik masih rendah.

Kata kunci: Partisipasi, Masyarakat, Keterlibatan, Keputusan Pemilu.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan satu diantara banyak negara di Dunia yang menganut sistem politik demokrasi, yang mana pemerintahannya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Proses demokrasi bukan hanya dilakukan di jenjang pemerintah pusat tetapi sampai pada tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Sala satu bentuk demokrasi di tingkat daerah adalah pilkada. Pilkada adalah satu kegiatan yang diikuti masyarakat yang tercatat sebagai pemilih di daerah tersebut. Mewujudkan kedaulatan rakyat di suatu daerah dapat diaplikasikan apabila pemilihan secara langsung dilakukan perorangan dalam memberikan partisipasi politiknya melalui hak suaranya secara langsung di bilik pemungutan suara. Masalah partisipasi masyarakat dalam pemilu di tingkat nasional bisa jadi terjadi di tingkat daerah bahkan merambat samapai ke desa-desa jika menghadapi pemilu.

Di desa Bilungala, jika tempat pemungutan suara (TPS) jauh dan aksesnya sulit, banyak warga yang enggan atau kesulitan untuk pergi ke TPS, terutama kelompok lansia dan orang-orang dengan mobilitas terbatas. Keempat; Sosialisasi pemilu yang kurang optimal dari pihak penyelenggara pemilu juga menjadi faktor penting. Jika informasi mengenai waktu dan tempat pemungutan suara, serta tata cara memilih, tidak disampaikan dengan baik, banyak warga yang bisa merasa bingung atau tidak terinformasi. Di desa-desa seperti Bilungala, pendekatan yang lebih langsung dan personal mungkin lebih efektif dibandingkan media massa atau online. Kelima; Budaya dan tradisi lokal dapat mempengaruhi partisipasi pemilih. Di beberapa desa, ada norma-norma atau keyakinan yang membuat warga lebih memilih untuk tidak terlibat dalam proses politik. Misalnya, jika ada anggapan bahwa politik adalah urusan yang kotor atau hanya untuk segelintir orang, partisipasi warga biasa bisa sangat rendah. Keenam; Kondisi ekonomi juga berperan dalam partisipasi pemilu. Masyarakat yang sibuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mungkin tidak memiliki waktu atau energi untuk berpartisipasi dalam pemilu. Di desa Bilungala, jika banyak warga yang harus bekerja pada hari pemilihan untuk mencukupi kebutuhan hidup, mereka mungkin akan mengesampingkan kewajiban politik mereka. Ketuju; Tokoh masyarakat, seperti kepala desa, ulama, atau tokoh adat, memiliki pengaruh besar terhadap keputusan warga. Jika tokoh-tokoh ini tidak aktif mengajak warga untuk berpartisipasi atau bahkan secara tidak langsung menghalangi partisipasi, maka tingkat partisipasi akan menurun. Kepemimpinan yang tidak mendorong partisipasi aktif bisa berdampak signifikan. Kedelapan; Pengalaman buruk dalam pemilu sebelumnya, seperti adanya intimidasi, kekerasan, atau kecurangan, dapat membuat warga enggan untuk berpartisipasi lagi. Jika warga desa Bilungala pernah mengalami atau menyaksikan hal-hal negatif terkait pemilu, mereka mungkin akan cenderung menghindar untuk terlibat. Kesembilan; Banyak warga desa mungkin belum sepenuhnya menyadari bahwa berpartisipasi dalam pemilu adalah hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Pendidikan kewarganegaraan yang tidak memadai bisa menyebabkan kurangnya kesadaran ini, sehingga partisipasi dalam pemilu tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting. Kesepuluh; Kampanye pemilu yang tidak merata dan tidak menjangkau daerah pedesaan seperti Bilungala juga bisa menjadi penyebab rendahnya partisipasi. Kandidat atau partai politik yang lebih fokus pada daerah perkotaan atau pusat kabupaten seringkali mengabaikan daerah pedesaan. Akibatnya, warga desa merasa tidak diperhatikan dan kehilangan motivasi untuk berpartisipasi.

Secara keseluruhan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu di desa Bilungala merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor yang saling mempengaruhi. Untuk meningkatkan partisipasi, diperlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, yang melibatkan peningkatan pendidikan politik, membangun kepercayaan terhadap sistem pemilu, memperbaiki infrastruktur, dan memastikan bahwa kampanye pemilu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Budiardjo (2008) partisipasi masyarakat di bidang politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok yang ikut serta dengan memilih pemimpin dalam pemerintahan secara langsung atau tidak. Partisipasi masyarakat melalui suaranya berkaitan juga dengan kepercayaan rakyat terhadap sistem pemilu yang akan menjadi wakil mereka dalam penyaluran aspirasi.

Partisipasi politik menjadi titik awal bagi masyarakat untuk melakukan perubahan dengan menyampaikan hak suara dalam pemilu. eneliti menemukan bahwa kurangnya pastisipasi masyarakat yang ada di kecamatan Bone Pantai khususnya di desa Bilungala. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman politik dan manfaat pemilu di masyarakat, ada juga masyarakat yang berkeinginan untuk memilih tetapi kondisi memaksa masyarakat untuk tidak dapat memberikan hak suara karena berada di luar daerah, dan ada pun masyarakat yang beralasan sakit .

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yang deskriptif yang dimaksud adalah penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang di teliti melalui data sampel atau populasi. Sedangkan pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, disarankan dan dilakukan oleh imforman atau sumbar data, dan bersifat *"perspektif emic"* artinya data yang diperoleh berdasarkan gejala sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan, yang di alami, disarankan dan difikirkan oleh informan/partisipan (sugiyono, 2013).

Hasil dan Pembahasan.

1. Tingkat Keterlibatan

Dari hasil wawancara bahwa tingkat keterlibatan masyarakat dalam pemilu adalah indikator penting dari kesehatan dan keberfungsian demokrasi di suatu negara. Partisipasi yang tinggi mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan keyakinan bahwa suara mereka memiliki pengaruh nyata dalam menentukan arah kebijakan publik dan pemerintahan. Faktor-faktor seperti kesadaran politik, latar belakang sosial-ekonomi, kualitas kampanye, akses terhadap informasi, dan kemudahan proses pemungutan suara semuanya berperan dalam mendorong atau menghambat partisipasi pemilih.

Keberlanjutan partisipasi juga memainkan peran kunci dalam membangun demokrasi yang kuat. Partisipasi yang konsisten dalam setiap pemilu, keterlibatan aktif dalam kegiatan politik sehari-hari, serta partisipasi dalam organisasi dan kelompok masyarakat menunjukkan komitmen jangka panjang masyarakat terhadap proses demokrasi. Pendidikan politik yang berkelanjutan dan dukungan dari lembaga serta infrastruktur politik yang efektif membantu memastikan bahwa partisipasi ini tetap tinggi dan berkesinambungan. Tanpa partisipasi yang berkelanjutan, demokrasi dapat melemah, dengan kurangnya representasi yang tepat dari kehendak rakyat.

Secara keseluruhan, untuk mencapai tingkat keterlibatan yang tinggi dan berkelanjutan, penting bagi

pemerintah, lembaga pemilihan, dan organisasi masyarakat untuk terus mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui program pendidikan politik, kampanye kesadaran, penyederhanaan proses pemungutan suara, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu. Dengan demikian, masyarakat akan merasa lebih terlibat dan berdaya dalam menentukan masa depan politik negara mereka, yang pada akhirnya memperkuat demokrasi secara keseluruhan.

2. Pengaruh terhadap Keputusan.

Hasil wawancara Pengaruh terhadap keputusan partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah hasil dari berbagai faktor yang kompleks dan saling berinteraksi. Faktor-faktor ini termasuk motivasi pribadi, seperti kesadaran dan kepedulian politik individu, serta kepercayaan terhadap sistem demokrasi. Faktor sosial dan ekonomi juga memainkan peran penting, di mana latar belakang pendidikan, status sosial-ekonomi, dan pengaruh lingkungan sosial seperti keluarga dan komunitas, dapat meningkatkan atau menghambat partisipasi pemilih. Selain itu, kemudahan akses ke tempat pemungutan suara dan logistik yang mendukung juga merupakan determinan penting dalam keputusan untuk berpartisipasi.

Kampanye politik dan akses terhadap informasi yang akurat juga sangat memengaruhi keputusan pemilih. Kampanye yang efektif mampu meningkatkan kesadaran politik dan menarik perhatian pemilih terhadap isu-isu yang relevan. Media massa dan media sosial berperan besar dalam menyediakan informasi yang membantu pemilih membuat keputusan yang terinformasi. Keberhasilan dalam menyampaikan pesan kampanye dan menarik perhatian pemilih dapat meningkatkan partisipasi. Di sisi lain, ketidakpercayaan terhadap informasi atau kampanye negatif dapat mengurangi motivasi untuk berpartisipasi.

Secara keseluruhan, keberlanjutan partisipasi dalam pemilu membutuhkan kombinasi dari motivasi pribadi yang tinggi, dukungan sosial dan ekonomi yang kuat, serta akses informasi dan infrastruktur politik yang memadai. Pemahaman yang baik tentang faktor-faktor ini penting bagi pemerintah dan lembaga pemilu untuk merancang strategi yang efektif guna meningkatkan dan mempertahankan partisipasi pemilih. Dengan memastikan bahwa semua aspek ini terpenuhi, partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat tetap tinggi dan konsisten, yang pada akhirnya memperkuat proses demokrasi dan memastikan bahwa pemerintahan yang terbentuk benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

3. Keberlanjutan Partisipasi.

Hasil wawancara indicator keberlanjutan partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah indikator penting dari kedewasaan demokrasi dan stabilitas politik suatu negara. Partisipasi yang konsisten menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya terlibat secara sporadis tetapi memiliki komitmen jangka panjang terhadap proses politik. Ini mencerminkan kesadaran politik yang tinggi dan keyakinan bahwa suara mereka dapat membawa perubahan positif. Keberlanjutan ini penting karena memastikan bahwa pemilu benar-benar representatif dan inklusif, mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat secara terus-menerus.

Keberlanjutan partisipasi juga bergantung pada berbagai faktor pendukung, termasuk pendidikan politik yang berkelanjutan, akses yang mudah ke tempat pemungutan suara, dan dukungan dari lembaga politik yang transparan dan akuntabel. Program pendidikan yang terus menerus membantu masyarakat memahami

pentingnya partisipasi mereka dan bagaimana proses politik bekerja, sementara akses yang mudah dan mekanisme pemungutan suara yang efisien mengurangi hambatan fisik dan birokrasi yang dapat menghalangi partisipasi. Selain itu, kepercayaan terhadap lembaga pemilihan yang transparan dan akuntabel memastikan bahwa masyarakat merasa proses pemilu adil dan layak diikuti.

Secara keseluruhan, untuk mencapai keberlanjutan partisipasi yang kuat, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pemilu, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat itu sendiri. Dengan menciptakan lingkungan politik yang mendukung dan inklusif, serta memastikan bahwa setiap individu merasa memiliki suara yang berharga dalam proses demokrasi, partisipasi masyarakat dalam pemilu dapat terus meningkat dan berkelanjutan. Ini tidak hanya memperkuat demokrasi tetapi juga memastikan bahwa pemerintahan yang terbentuk benar-benar mewakili kehendak rakyat secara autentik dan berkelanjutan.

PENUTUP

Simpulan.

Dari ke tiga identifikasi masalah telah di bedah dengan teori Partisipasi masyarakat dengan 3 (tiga) indicator yaitu; a. *Tingkat Keterlibatan*; yaitu : Masyarakat secara rutin kurang berpartisipasi dalam pemilu, belum menunjukkan kesadaran politik yang tinggi dan komitmen jangka panjang terhadap proses politik. Konsistensi belum menjamin representasi yang akurat dari beragam suara masyarakat dalam setiap pemilihan. b.; *Pengaruh terhadap keputusan* yaitu; Dukungan Infrastruktur Politik: Dukungan dari lembaga dan infrastruktur politik, termasuk akses mudah ke tempat pemungutan suara dan lembaga pemilihan yang transparan, belum membantu terhadap partisipasi masyarakat. Hal berpengaruh terhadap individu masyarakat merasa bahwa partisipasinya kurang dihargai dan kurang penting. c. *Keberlanjutan Partisipasi*; Keberlanjutan Partisipasi terutama dalam pendidikan politik yang berkelanjutan sangat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam demokrasi dan bagaimana proses politik bekerja. Ini memperkuat kesadaran politik dan keyakinan masyarakat akan dampak positif dari suara mereka. Namun dalam kenyataan tingkat pemahaman masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 4(2), 329-348.

Haluana'a, F. J. (2019). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

Haluana'a, F. J., Nasution, I., & Batubara, B. M. (2020). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM), 2(1), 46-52.

Hasibuan, S. J., Kadir, A., & Nasution, M. H. T. (2018). Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018. PERSPEKTIF, 7(1), 1-5.

Hermanto, J., Purwatiningsih, A., & Rifa'i, M. (2020). Pengaruh isu, figur, rekam jejak dan partai politik terhadap partisipasi pemilih dalam pemilihan presiden (pilpres) tahun 2019. Reformasi, 10(1), 27-33.

Lestari, E. Y., & Arumsari, N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan walikota semarang di kota semarang. Integralistik, 29(1), 10.

Liando, D. M. (2016). Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat. (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum), 3(2), 14-28.

Putri, M. P. (2016). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur. Jurnal Ilmu Komunikasi, 30.

Sa'ban, L. A., & Sadat, A. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Baubau Tahun 2018. JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 4(1), 29-38.

Sofyan, A. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2019. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 8(1), 1-14.

Subekti, T. (2014). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum (Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

Suharyanto, A. (2014). Partisipasi politik masyarakat Tionghoa dalam pemilihan kepala daerah. JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA), 2(2), 151-160.